

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah (Pemda) berlandaskan dasar otonomi daerah, memungkinkan pemanfaatan sumber daya domestik guna menaikkan kemakmuran masyarakat dan mengurangi korupsi serta nepotisme. Hal ini diatur didalam UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 terkait Pemerintahan Daerah serta UU No/ 25 Tahun 1999 terkait Keseimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian, UU itu mengalami perubahan melalui hadirnya UU No. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah serta UU No. 33 Tahun 2004 terkait Keseimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. Tujuan pelaksanaan Pemda guna menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara adalah agar dapat menaikkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan serta pelayanan publik, juga membuat kualitas layanan serta kemakmuran masyarakat menjadi lebih optimal (Namiati, 2008).

Untuk menaikkan kualitas kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu untuk bisa membiayai operasionalnya dengan mandiri dan meminimalisir dari mengandalkan pemerintah pusat, hingga akhirnya kapasitas Pemda dapat optimal. Oleh sebabnya, Pendapatan Asli Daerah harus memberikan kontribusi signifikan terhadap dana yang diperlukan

untuk menjaga kelangsungan pemerintahan daerah (Fathah, 2017). Sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan untuk kepentingan masyarakat, kinerja keuangan daerah harus disajikan dalam laporan pertanggungjawaban untuk menjadi bagian dari proses evaluasi. Laporan ini disajikan kepada publik untuk memastikan transparansi informasi dan efisiensi penggunaan anggaran, dengan tujuan agar dana bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. (Yulinchton et al., 2022)

Dengan demikian, keterbukaan pemerintah akan tercapai melalui pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, didukung oleh alokasi anggaran daerah, dan melibatkan masyarakat didalam tahapan perancangan serta peningkatan wilayah. Namun, Pemda masih sangat mengandalkan pendanaan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, diharapkan Pemda dapat memajemen sumber pemasukan dari kekayaan ataupun potensi lokal serta memanfaatkan sumber daya finansial mereka secara efektif.

Satu dari sekian unsur amat penting dari tata kelola pemerintahan serta pembangunan daerah ialah manajemen finansial daerah dengan efektif agar selaras dengan tujuan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari penyajian laporan keuangan adalah untuk memahami bagaimana sumber daya ekonomi digunakan dalam menjalankan operasi pemerintahan, mengevaluasi kondisi keuangan pemerintah daerah, menilai efektivitas dan efisiensi program, serta memastikan bahwa laporan disajikan dengan akurat dan sejalan dengan peraturan yang diberlakukan. Utamanya,

maksud dari melaporkan finansial pemerintah ialah agar bisa memberikan informasi yang mana bermanfaat dalam tahapan penetapan tindakan serta memperlihatkan tanggung jawab entitas pelapor terhadap sumber daya sebagaimana sudah diamanahkan atas mereka.

Meskipun laporan finansial dirancang untuk tujuan umum, tidak semua pembaca mampu memahaminya dengan baik. Banyak pemangku kepentingan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi, yang merupakan alat utama dalam penyusunan laporan keuangan. Mereka membutuhkan bantuan untuk mengerti dan menginterpretasikan laporan keuangan. Sehingga dari itu, Analisis kinerja keuangan perlu dilakukan untuk memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan laporan finansial Pemda untuk bahan acuan penetapan Keputusan.

Analisa kinerja finansial pemerintah ialah metode untuk mengevaluasi efektivitas kinerja pemerintah. Pengelolaan keuangan yang baik di tingkat daerah dapat memberi pengaruh positif pada kemajuan wilayah tersebut. Penilaian terhadap efektivitas pemerintah daerah dalam memenuhi sasaran finansial pada jangka waktu tertentu disebut kajian performa finansial Pemda (Anugeraheni & Yuniarta, 2022). Guna menjamin mutu serta keandalan laporan finansial, diperlukan metode atau pendekatan khusus dalam analisis kinerja keuangan yang berguna bagi para pembuat kebijakan. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menganalisa laporan finansial meliputi analisa keragaman, analisa perbandingan, analisa pertumbuhan, analisa regresi, serta analisa prediktif.

Satu dari sekian cara yangmana diterapkan ialah analisis rasio finansial, yang melibatkan perbandingan antara beberapa angka yang diambil dari berbagai komponen dalam laporan finansial (Farida & Nugraha, 2019). Analisa perbandingan finansial pun bisa dipakai sebagai identifikasi perubahan performa tiap tahunnya (Mahmudi, 2016). Penggunaan perbandingan finansial daerah selaku instrumen untuk menganalisis performa diterapkan melalui melakukan perbandingan hasil dari kurun waktu ini dengan kurun waktu sebelumnya guna mengamati tren yang muncul (Susanto, 2019).

Menurut penelitian sebelumnya oleh Susanto (2019), perbandingan finansial sebagaimana diterapkan didalam menilai performa Pemda meliputi Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian Finansial Daerah, Rasio Aktivitas, serta Rasio Pertumbuhan. Sementara itu, studi (Sartika, 2019) menggunakan perbandingan seperti Rasio Efisiensi Finansial Daerah, Rasio Kemandirian Finansial Daerah, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Rasio Keserasian. Dalam penelitian Zulkarnain (2020), perbandingan yang digunakan mencakup Rasio Finansial Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Pemda, Rasio Efektivitas PAD, serta Rasio Belanja Modal. Sementara Fera Mauliana (2019) menerapkan Rasio Finansial Kemandirian Finansial Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja, serta Rasio Pertumbuhan dalam penelitiannya.

Menurut temuan studi (Fera Maulina, 2019), korelasi diantara taraf kemandirian serta desentralisasi fiskal di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa kemandirian terdapat dalam kategori “partisipatif,” efektivitas tergolong “efektif,” sementara efisiensi dikategorikan sebagai “kurang efisien.” Rasio Keserasian mengindikasikan fluktuasi dalam perbandingan pertumbuhan serta ketimpangan dalam pengeluaran. Di sisi lain, studi Susanto (2019) menemukan bahwasanya perbandingan efektivitas diasumsikan efektif, Sementara itu perbandingan efisiensi dinilai kurang optimal, serta perbandingan kemandirian dalam manajemen finansial daerah masih tergolong kecil. Studi ini pun mengungkapkan bahwasanya perbandingan pertumbuhan elemen PAD serta perbandingan aktivitas berada pada kategori yang kurang baik. Selain itu, pertumbuhan pengeluaran dianggap tidak maksimal karena bagian pengeluaran operasional lebih dominan dibandingkan dengan pengeluaran modal. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mampu meningkatkan PAD dan mengutamakan pada pengeluaran daerah. Penelitian ini berbeda dari studi-studi sebelumnya karena memakai tujuh karakteristik dalam evaluasi performa keuangan Pemda. Studi ini dianggap penting dikarenakan melalui analisa performa finansial, Pemda Kabupaten Tegal mampu mengevaluasi performa keuangan mereka selama kurun waktu 2018-2022. Memanfaatkan informasi ini, Pemda mampu menilai serta melakukan perbaikan kualitas laporan keuangan mereka untuk periode berikutnya. Berdasar pada latar belakang itu, penulis memutuskan

melaksanakan studi berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tegal**”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam studi ialah bagaimana performa finansial Pemda Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam studi ialah guna memahami performa finansial Pemda Kabupaten Tegal

1.4 Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian tetap terfokus serta tidak keluar dari pengkajian sebagaimana dimaksudkan, maka studi ini di batasi pada:

- a. Menggunakan data dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tegal di tahun anggaran 2018-2022.
- b. Penilaian performa finansial Pemda Kabupaten Tegal tahun 2018-2022
- c. Menggunakan perhitungan perbandingan ketergantungan finansial daerah, perbandingan kemandirian, perbandingan pertumbuhan, perbandingan tingkat desentralisasi fiskal, perbandingan efektifitas, perbandingan efisiensi, perbandingan keselarasan belanja APBD serta perbandingan keserasian

- d. Ada satu rasio yang mana tidak diungkapkan didalam studi ini dikarenakan keterbatasan data penelitian yaitu *debt service coverage ratio*

1.5 Manfaat Penelitian

Studi ini diinginkan bisa bermanfaat seperti di bawah ini:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Studi ini diinginkan bisa memperluas pengetahuan, menyediakan kontribusi pemikiran, serta menjadi acuan dan sumber informasi dalam bidang Akuntansi Sektor Publik mengenai evaluasi performa finansial Pemda, untuk peneliti di masa depan yang berminat melakukan studi sejenis.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat teruntuk peneliti meliputi kesempatan untuk berlatih dalam penulisan dan penelitian akademis. Tidak hanya itu, penelitian ini diharap mampu meningkatkan pemahaman dan membantu penerapan pengetahuan yang telah diperoleh mengenai Akuntansi Sektor Publik.

b. Bagi Pemerintah

Guna menilai keefektifan manajemen finansial daerah, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan rekomendasi, keuntungan, dan data yang berguna bagi berbagai pihak terkait,

seperti pemerintah pusat, pemda, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, serta instansi pemerintah yang lain.

c. Bagi Akademis

Studi ini diharap mampu memperkaya literatur serta menjadi referensi untuk studi-studi berikutnya yang terkait dengan Akuntansi Sektor Publik.